



Kementerian Agama

LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Pembimas Hindu
Nama Kegiatan	: Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Hindu
Tahun Pelaksanaan	: 2021
Tujuan Kegiatan	: Melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel
Jenis Kegiatan	: Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos)

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
1	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penetapan kegiatan tidak mengacu pada sasaran strategis dan IKU unit kerja	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK)	Verifikasi dan Validasi	SK TIM	Ka. Kanwil	Tim Penerima	Verifikasi dan Validasi			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
2	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Hindu	Verifikasi dan Validasi			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
3	<p>TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)</p> <p>PENYEBAB: Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan</p>	<p>TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>SK Tim Pelaksana</p>	<p>Ka. Kanwil</p>	<p>Pembimas Hindu</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
4	<p>TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)</p> <p>PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan</p>	<p>TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>SK Tim Pelaksana</p>	<p>Ka. Kanwil</p>	<p>Pembimas Hindu</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>			
5	<p>Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM</p> <p>PENYEBAB: Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku</p>	<p>Rencana biaya tidak dapat dibayarkan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Nota Dinas</p>	<p>PPK</p>	<p>Pembimas Hindu</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
6	<p>Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM</p> <p>PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidi dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan</p>	<p>Rencana biaya tidak dapat dibayarkan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Surat Pengumuman Bantuan</p>	<p>Pembimas Hindu</p>	<p>Lembaga Keagamaan/Pasraman</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>			
7	<p>Bantuan tidak sampai kepada penerima</p> <p>PENYEBAB: Data penerima bantuan tidak valid (rekening, alamat, no. telp, dll)</p>	<p>Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Lembar list pengajuan SPM</p>	<p>Nota Dinas</p>	<p>PPK</p>	<p>Pembimas Hindu</p>	<p>Lembar list pengajuan SPM</p>			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
8	Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima PENYEBAB: Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan Validasi	SK Penerima Bantuan	Ka. Kanwil	Penerima Bantuan	Verifikasi dan Validasi			
9	Jumlah bantuan tidak diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan PENYEBAB: Fungsi pengendalian antara, bendahara, PPK, dan PPSPM belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Berpotensi merugikan negara SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Lembar list pencairan SPM	SPM	PPK	Penerima Bantuan	Lembar list pencairan SPM			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
10	<p>Program pemberian bantuan belum ada Juklak/Juknis</p> <p>PENYEBAB: Penanggung jawab program pemberian bantuan tidak menyadari risiko akibat tidak ada juknis/juklak pemberian bantuan</p>	<p>Pemberian bantuan tidak dapat diukur tingkat kepatuhan dan SPI-nya</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	Monitoring dan Evaluasi				Monitoring dan Evaluasi			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
11	<p>Penerima bantuan tidak memenuhi syarat sesuai Juknis</p> <p>PENYEBAB: Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan tidak dilakukan</p>	<p>Pemberian bantuan tidak tepat sasaran</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	Verifikasi dan Validasi				Verifikasi dan Validasi			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
12	<p>Penerima bantuan tidak melalui prosedur sesuai Juknis/Juklak</p> <p>PENYEBAB: Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Pemberian bantuan berpotensi tidak tepat sasaran</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	Sosialisasi Juklak/juknis	Surat Undangan Sosialisasi	Pembimas Hindu	Penerima Bantuan	Sosialisasi Juklak/juknis			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
13	<p>Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan tidak dibuat/disampaikan kepada pemberi bantuan</p> <p>PENYEBAB: Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Bantuan yang diberikan tidak dapat dievaluasi secara tepat</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	Monitoring dan Evaluasi	Surat Permohonan Laporan	Pembimas Hindu	Penerima Bantuan	Monitoring dan Evaluasi			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
14	Laporan komprehensif tentang program pemberian bantuan tidak dibuat laporan oleh penanggung jawab kegiatan/program PENYEBAB: Penanggung jawab program pemberian bantuan tidak mematuhi ketentuan yang ada	Program pemberian bantuan tidak dapat dievaluasi baik keberhasilan maupun kegagalannya secara tepat SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Monitoring dan Evaluasi	Surat Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan	Pembimas Hindu	Penerima Bantuan	Monitoring dan Evaluasi			

Bengkulu, 23 Desember 2021

Pemilik Risiko,



(Dis. : Mado Masib Mandika, M.Pd

NIP 196608081993031003